

X

**PKI
dan
ALRI**

D.N. AIDIT

PKI
dan
ALRI

DM 4101

~~Rp. 60.00~~

T
359.04
Aid
P

PKI dan ALRI (SESKOAL)

D. N. AIDIT

Menteri/Wakil Ketua MPRS/
Ketua CC PKI

CEK - 2001



Jajasan „Pembaruan”
Diakarta 1963

PER. KEM. RI

6808-6

P K I
dan
ALRI (SESKOAL)

D. N. V. 1911

Memorandum
Kantor
Kantor



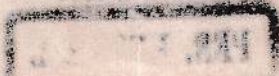
rentjana kulit :

nugroho



Memorandum

Kantor



1-8-18

Sekedar Pengantar

Brosur *PKI dan ALRI (SESKOAL)* ini memuat tjeramah Menteri/Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI D.N. Aidit dihadapan para mahasiswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL) di Djakarta. Tjeramah itu diberikan pada tanggal 16 Djuli 1963 dan bertemakan *Beberapa Masalah Politik Dan Pertahanan*.

Selain mengupas berbagai soal pokok Revolusi Indonesia, hubungan pertahanan dengan strategi umum Revolusi Indonesia dan hubungan Angkatan Bersenjata dengan Rakjat dalam pelaksanaan pertahanan, pentjeramah membahas pula suatu masalah penting bagi negara kita, jaitu konsep negara maritim.

Dengan menerbitkan tjeramah tersebut kami harapkan dapat memberi sumbangan untuk mendjadikan masalah pertahanan masalah seluruh Rakjat Indonesia. Hal ini pasti akan memperlantjar pelaksanaan Ketetapan MPRS no. II/1960 mengenai pertahanan Rakjat dan memperkuat persatuan semua kekuatan revolusioner dinegeri kita.

Penerbit

Agustus 1963

Sekolah Penguatan

Presiden PKI dan ALRI (SESKOAL) ini akan
menjadi pemimpin. Menteri Dalam Negeri (MID)
Kerusi CC PKI D.N. Akan dibagikan pada masa
sewa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut
(SESKOAL) di Djakarta. Tindakan ini diberikan
pada tanggal 16 Juli 1963 dan bertujuan be-
berapa Masalah Politik Dan Pertahanan.

Sebelum mengadakan pelatihan soal pokok Revolusi
Indonesia, hubungan pertahanan dengan strategi
dalam Revolusi Indonesia dan hubungan Angkatan
Bersebut dengan Rakyat dalam pelaksanaan
pertahanan, pemerintah memahami bahwa suatu
masalah penting bagi negara kita yaitu konsep
negara maritim.

Dengan meniadakan ketentuan tersebut kami
harapkan dapat memberi sumbangan untuk men-
jadikan masalah pertahanan masalah seluruh
Rakyat Indonesia. Hal ini pada saat memberikan
dan pelaksanaan Ketetapan MPRS no. 11/1960
tentang pembinaan Rakyat dan memperkuat per-
saluran semua kegiatan revolusioner dengan kita

Saja sungguh merasa gembira dan oleh karena itu mengutjapkan terimakasih jang se-besar²nja atas kesempatan jang diberikan kepada saja baik sebagai Menteri/Wakil Ketua MPRS maupun sebagai Ketua Komite Central Partai Komunis Indonesia, salahsatu Partai NASAKOM, untuk memberikan tjeramah dihadapan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL). Tak perlu kiranja saja djelaskan, bahwa ini bukan pertama kalinja saja diminta memberi tjeramah di-muka Angkatan Bersendjata Republik Indonesia. Bahkan dengan adanja tjeramah ini sudah bisa dikatakan bahwa tradisi mentjapai saling penger-tian dan saling mengenal antara Angkatan Ber-sendjata dengan berbagai golongan Rakjat ter-masuk kaum Komunis, telah tertanam didalam setiap Angkatan Bersendjata kita.

Sewaktu saja dalam bulan Februari jl. mem-beri tjeramah dimuka para mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), antara lain saja katakan, bahwa ada orang jang bingung men-dengar bahwa Ketua PKI memberi tjeramah ke-pada kader² kepolisian. Sudah tentu, dengan ada-nja tjeramah ini, tjeramah kepada kader² tinggi Angkatan Laut Republik Indonesia, dan se-belum ini telah diberikan pula tjeramah² kepada

kader² tinggi AURI dan kader² tinggi ADRI, kebingungan orang² itu semakin men-djadi², sebab ternyata semua Angkatan Bersendjata benar² men-djalankan wedjangan Presiden Sukarno jang di-kemukakan dalam pidato „Tahun Kemenangan” tanggal 17 Agustus, 1962, jaitu „*memberantas komunisto-phobi*”. Biarkanlah mereka bingung, kita berdjalan terus !

Memang memberantas Komunisto-phobi merupakan tugas mutlak dalam meneruskan perdjuaan Rakjat Indonesia untuk menjelesaikan Revolusi, karena Komunisto-phobi dengan sendirinja berarti Nasakom-phobi, Rakjat-phobi, massa-phobi, bu-ruh-phobi dan tani-phobi. Phobi² ini adalah ibarat djarum ratjun jang menusuk persatuan nasional kita. Pada kesempatan ini, saja memberi hormat se-tinggi²nja kepada Angkatan Laut R.I. dan kepada semua Angkatan Bersendjata jang, melalui tjeramah² sematjam ini, melakukan sesuatu jang kongkrit sekali untuk memberantas phobi² itu.

Tema jang akan saja bahas dalam tjeramah ini adalah tentang „*Beberapa Masalah Politik dan Pertahanan*”. Sungguh suatu tema jang amat penting ! Sebagaimana saja djelaskan dalam tjeramah saja di SESKOAD belum lama berselang, segala soal politik dan sosial jang mau kita bahas, haruslah kita bahas dalam hubungan dengan Revolusi Indonesia. Begitu pula dengan tema tjeramah saja sekarang. Dalam hubungan dengan tema ini, politik adalah strategi dan taktik pimpinan dari per-djuangan Rakjat Indonesia untuk mentjapai tjita² dan tudjuan Revolusi, untuk menjelesaikan Revo-

lusi, sedangkan pertahanan adalah strategi dan taktik pelaksanaan yang dilakukan Angkatan Bersendjata RI bersama² dengan seluruh Rakjat di bidang pertahanan militer dan keamanan untuk membela, menyelamatkan, mengabdikan dan memenangkan perjuangan revolusioner Rakjat Indonesia itu. Kedua-duanya harus tunduk pada strategi umum Revolusi Indonesia yang digariskan dalam Manipol, yaitu bahwa sekarang ini Rakjat Indonesia harus menyelesaikan Revolusinya yang bersifat nasional dan demokratis sebagai landasan untuk selanjutnya memasuki fase atau tahap kedua Revolusi Indonesia yang bersifat Sosialis, artinya yang bertudjuan dan bertugas membangunkan masyarakat sosialis yang adil.

Politik dan pertahanan adalah dwitunggal yang tak dapat dipisah²kan apalagi dipertentangkan, seperti halnya Rakjat dengan Angkatan Bersendjata adalah dwitunggal yang juga tak dapat dipisah-pisahkan apalagi dipertentangkan. Usaha² untuk memisahkan apalagi mempertentangkan politik dengan pertahanan atau Rakjat dengan Angkatan Bersendjata adalah usaha kontra-revolusioner, karena menghambat dan mempersulit perjuangan kita bersama untuk menyelesaikan revolusi kita.

Seperti halnya perjuangan Rakjat harus dipimpin oleh politik yang tepat, juga pertahanan harus dipimpin oleh politik yang tepat. Seperti halnya perjuangan Rakjat Indonesia harus dipimpin Manifesto Politik yang menggariskan strategi umum Revolusi Indonesia, juga pertahanan Republik

Indonesia harus dipimpin Manifesto Politik. Ini satu²nja djaminan bahwa perdjjuangan Rakjat tepat; ini satu²nja djaminan bahwa pertahanan RI tepat.

Tjeramah ini akan saja bagi dalam dua bagian. Jang pertama, *Beberapa Soal Tentang Politik* dan jang kedua, *Beberapa Soal Tentang Pertahanan*.

I. BEBERAPA SOAL TENTANG POLITIK

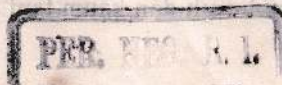
Diatas saja sudah menjebut tentang strategi umum Revolusi Indonesia, jaitu strategi daripada perdjuangan Rakjat Indonesia dalam menjelesaikan revolusi kita. Djika kita berbitjara tentang strategi umum revolusi, saja rasa bagi kita harus per-tama² djelas apa sebenarnja jang dimaksudkan dengan revolusi. Kita semua setiap hari bitjara tentang revolusi dan tentang kontra-revolusi, tentang orang revolusioner dan orang kontra-revolusioner. Djelas kiranja, bahwa kalau belum ada pengertian jang tepat mengenai apa jang dimaksud dengan revolusi, tentunja pembitjaraan² itu tak lain hanja omong-kosong dan bisa berbahaja.

Revolusi bukan suatu tjetusan perasaan marah orang² jang bersifat subjektif dan jang setjara amuk²an dan membabibuta mau mengubah hal jang tidak disukainja. Revolusi adalah suatu perubahan dan perombakan kwalitatif dan struktural dari masjarakat sebagai suatu keharusan objektif sedjarah jang terdjadi sesuai dengan hukum² perkembangan masjarakat.

Dasar daripada perkembangan masjarakat jalah produksi kekajaan materiil, karena memang tidak mungkin ada masjarakat jang dapat hidup djika tidak ada kekajaan materiil. Bajangkanlah betapa rupanja „masjarakat” tanpa kekajaan materiil hasil produksi kaum buruh dan kaum tani ! Sudah terang

kita tidak berani, dan bahkan tidak mungkin berkumpul disini! Hubungan² sosial jang tertjiptakan antara manusia dengan manusia, jaitu susunan masjarakat, djustru timbul dalam proses manusia menundukkan alam dan mentjiptakan kekayaan materiil untuk kepentingan kelangsungan dan perbaikan kehidupan manusia sendiri.

Setelah mendengar pendjelasan saja ini, mungkin ada jang terus memberi reaksi: Nah, lihat, orang² Komunis memang orang² „materialis“, hanya memikirkan materi, tidak memikirkan ide, tidak punja „idealisme“. Reaksi² jang demikian tidak mempunyai dasar samasekali, sebab djustru karena kaum Komunis mendasarkan pengertiannya mengenai masjarakat kepada kenjataan jang objektif, jaitu kekayaan materiil, maka terbukalah kemungkinan untuk merealisasi ide² atau tjita² kita, ide² atau tjita² seluruh umatmanusia, artinja untuk mentjiptakan masjarakat jang bisa mendjamin kemakmuran untuk setiap orang, untuk mentjiptakan masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia. Tjita² manusia jang paling luhur itu akan tinggal sebagai tjita² atau impian belaka kalau kita tidak mempunyai alat² untuk merealisasi tjita² itu, jaitu pengertian jang tepat mengenai hukum² perkembangan masjarakat. Djadi, kaum Komunis mengakui peranan aktif daripada ide, peranan ide dalam mengubah keadaan. Tetapi kaum Komunis tidak mungkin membayangkan adanya ide tanpa didahului adanya materi, misalnja otak. Ide tidak bisa kelujuran tanpa materi, chususnja tanpa otak.



PEMILIKAN ATAS ALAT² PRODUKSI MENENTUKAN HUBUNGAN² ANTAR-MANUSIA

Sedjarah perkembangan masyarakat mengajar kepada kita bahwa tenaga² produktif, yaitu tenaga-tenaga yang mentjiptakan kekayaan materiil termasuk alat² kerdja, sasaran kerdja dan tenaga kerdja, berkembang setjara terusmenerus, setjara tak ter-putus². Kedjajaan manusia untuk mentjiptakan, untuk menundukkan alam agar memenuhi kebutuhan² manusia sendiri memang tak terbatas dan sungguh mengagumkan. Tetapi dalam proses mentjiptakan kekayaan materiil melalui tenaga² produktif itu, timbullah hubungan² produksi, yaitu *hubungan antara manusia dengan manusia* yang pada pokoknja ditentukan oleh kenyataan *siapa yang memiliki alat² produksi yang terpenting, siapa yang menguasai proses produksi itu.*

Sedjarah perkembangan masyarakat mengajar kepada kita bahwa dalam setiap masyarakat yang berdasarkan pemilikan perseorangan atas alat² produksi, yaitu yang berdasarkan penghisapan oleh mereka yang memiliki alat² produksi atas mereka yang tidak memiliki alat² produksi, akan tiba waktunya dimana hubungan² produksi itu merupakan belenggu terhadap perkembangan setjara terusmenerus tenaga² produktif itu. Hubungan² produksi yang bersifat feodal dimana tuantanah menghisap kaum tani merupakan belenggu terhadap perkembangan tenaga² produktif dalam masyarakat feodal. Hubungan² produksi yang bersifat kapitalis, dimana burdjuasi (kapitalis) menghisap proletariat,

merupakan belenggu terhadap perkembangan tenaga² produktif dalam masjarakat kapitalis. Hubungan² produksi dalam masjarakat Indonesia sekarang mengambil bentuk kekuasaan modal monopoli asing, jaitu kekuasaan imperialis, jang bersekutu dengan kaum feodal, jang merupakan belenggu terhadap tenaga² produktif kaum buruh dan seluruh Rakjat Indonesia jang dihisap oleh imperialisme dan sisa² feodalisme.

Kontradiksi antara tenaga² produktif dengan hubungan² produksi didalam proses perkembangannya menimbulkan revolusi. Ini berarti, bahwa kontradiksi itu harus diselesaikan dengan melalui revolusi. Tudjuan daripada revolusi ialah untuk mengachiri hubungan² produksi jang telah menjadi belenggu itu, artinja mengubah susunan masjarakat dan membangun masjarakat baru jang membebaskan tenaga² produktif untuk bisa berkembang tanpa halangan. Perdjuangan kaum tani melawan penghisapan feodal dan perdjuangan seluruh Rakjat melawan penghisapan imperialis atau kekuasaan imperialis merupakan perdjuangan untuk menjelesaikan revolusi kita. Tanpa perdjuangan-perdjuangan itu, revolusi Indonesia tidak akan bisa diselesaikan.

Kalau apa jang dimaksudkan dengan revolusi sudah djelas, maka tidak sulit bagi kita untuk mendjelaskan apa jang dimaksudkan dengan Rakjat. Rakjat berarti semua golongan jang berkepentingan supaja revolusi itu diselesaikan, jaitu semua golongan jang ikut berevolusi. Dan oleh karena Revolusi Indonesia merupakan revolusi anti-feodal

dan anti-imperialis, maka bagi Indonesia, Rakjat jang ikut berevolusi adalah semua golongan jang dihisap atau jang dirugikan oleh feodalisme dan imperialisme itu. Djadi, orang² Indonesia jang memihak imperialisme dan feodalisme tidak mungkin kita masukkan kategori Rakjat, mereka termasuk kategori anti-Rakjat, walaupun mereka warga-negara Indonesia.

ORANG REVOLUSIONER ADALAH ORANG JANG AKTIF MEMIHAK PERDJUANGAN RAKJAT

Selandjutnja, kita perlu pula mentjapai pengertian jang tepat mengenai apa jang dimaksudkan dengan orang revolusioner. Bung Karno telah berulang² berkata bahwa „pada akhirnya manusialah jang menentukan”. Jang dimaksudkan dengan ini ialah bahwa tugas² disetiap bidang kenegaraan atau kemasjarakatan hanja bisa didjalankan oleh orang² jang menjatukan diri atau jang mengintegrasikan diri dengan tugas² revolusi kita. Revolusi jang berarti suatu perubahan susunan masjarakat setjara struktural dan hakiki tidak akan bisa berdjalan djika kekuasaan negara tidak disesuaikan dengan susunan masjarakat baru jang harus dibangun. Bagaimanapun djuga, kekuasaan negara adalah didjalankan oleh orang² jang memegang kekuasaan, dan dengan sendirinja kekuasaan negara hanja bisa dikatakan sesuai dengan susunan masjarakat jang harus dibangun djika kekuasaan negara diisi dengan orang² revolusioner, jaitu orang² jang mengintegrasikan diri dengan

perjuangan Rakyat untuk menjelesaikan revolusi, jang sepenuhnya dan setjara aktif berfihak pada perjuangan Rakyat. Dalam revolusi anti-imperialis dan anti-feodal, maka tjiri² pokok orang² revolusioner ialah tjiri² anti-imperialis dan anti-feodal; dan karena revolusi Indonesia berperspektif Sosialisme, maka orang² revolusioner harus ber-tjita² Sosialisme.

Mungkin masih ada orang jang beranggapan, bahwa orang² revolusioner tjukup berketjimpung dibidang kepartaian dan organisasi massa sadja, sedangkan dalam kekuasaan negara orang² harus „objektif“, „berdiri diatas politik“, „tidak berfihak“. Anggapan ini adalah anggapan jang salah dan reaksioner, karena bisa membuka pintu bagi kaum kontra-revolusioner untuk bertjokol dalam alat² kekuasaan negara. Padahal, dalam tiap revolusi soal jang terpenting adalah soal kekuasaan negara.

Didalam suatu revolusi, *jang objektif ialah berfihak kepada revolusi, berfihak kepada keharusan objektif daripada perkembangan masyarakat.* Sikap-sikap jang lain adalah sikap² jang subjektif, sebab siapapun jang tidak aktif mengintegrasikan diri dengan revolusi, jang tidak berfihak kepada revolusi, jang tidak menyesuaikan dan mendasarkan segala kegiatan²nja serta tindakan²nja pada kebutuhan revolusi paling sedikit akan menghambat revolusi, dan malahan sedar atau tidak, bisa dipergunakan untuk maksud² kontra-revolusi. Djadi kelirulah pendapat sementara orang jang berkemauan baik jang mengatakan bahwa kita tidak

boleh bersikap objektif terhadap revolusi. Djuga keliru pendapat sementara orang yang berkema-
uan buruk yang mengatakan, bahwa berfihak ke-
pada revolusi berarti bersikap tidak objektif. Pen-
dapat² ini disamping tidak benar, djuga bersifat
membenarkan „keobjektifan” kaum reaksioner.
Bukankah kaum reaksioner dan kontra-revolusi-
oner selalu bersembojan „objektif”, „tidak ber-
fihak” untuk kegiatan kontra-revolusi mereka?
Padahal, merekalah manusia² yang paling subjek-
tif, paling berat sebelah, karena mereka menentang
arus revolusi yang objektif. Kita tidak boleh ter-
tipu oleh sembojan² itu. Sembojan² itu sengadja
dipergunakan karena dalam keadaan Rakjat se-
dang mendjalankan revolusi, maka sembojan yang
terang²an berlawananan dengan revolusi akan sa-
ngat mudah membuka kedok kaum kontra-revolusi
sehingga akan menggagalkan usaha² mereka se-
belum dimulai. *Djadi, sikap yang paling objektif
adalah sikap memihak Rakjat dan revolusi, karena
perkembangan objektif adalah menurut kehendak
Rakjat dan sesuai dengan hukum² revolusi.*

Djika kita ingin menjelesaikan revolusi, maka
seluruh aparatur negarapun harus didjalankan oleh
orang² revolusioner, jaitu orang² yang mendasar-
kan setiap kegiatan serta tindakannya pada prin-
sip-prinsip pokok revolusi itu, yang tunduk kepada
strategi umum Revolusi Indonesia. Partai² politik
harus tunduk kepada strategi umum Revolusi In-
donesia. Organisasi² massa serta organisasi² lain
harus tunduk kepada strategi umum Revolusi In-
donesia. Angkatan Bersendjata, jaitu seluruh

aparatus pertahanan dan keamanan, harus tunduk kepada strategi umum Revolusi Indonesia, seluruh aparaturnya harus tunduk kepada strategi umum Revolusi Indonesia. Hanya jika demikian, maka akan terbukalah kemungkinan bagi kita untuk menyelesaikan revolusi kita dalam arti kata yang sesungguhnya.

STRATEGI UMUM REVOLUSI INDONESIA DITENTUKAN DALAM MANIPOL

Apa yang dimaksudkan dengan „strategi umum Revolusi Indonesia“ ? Bagi kita di Indonesia, pertanyaan itu sudah tidak sulit untuk dijawab karena kita sudah mempunyai dokumen resmi yang memberi jawabannya, yaitu Manifesto Politik. Sungguh untung kita, dengan memiliki Manipol itu kita sudah tidak perlu debat² lagi mengenai hal yang sedemikian pokok itu. Karena Manipol merupakan garis yang memimpin kita semua, merupakan haluan yang telah ditetapkan oleh MPRS sebagai haluan negara, maka kita telah melewati satu tingkat yang berat. Dengan adanya Manipol yang telah diterima oleh semua golongan Rakyat yang berevolusi, dan yang telah diterima oleh seluruh Angkatan Bersenjata, maka telah hilang alasan pokok untuk timbulnya kontradiksi diantara dua sektor masyarakat kita. Keheranan orang² asing, misalnya, jika melihat Komunis diundang untuk memberi tjeramah kepada pegawai² Departemen ini, kepada Angkatan Bersenjata itu, gampang dijawab. Manipol adalah program bersama

seluruh Rakjat Indonesia termasuk Angkatan Bersendjata, djadi tidak ada alasan sedikitpun untuk adanja Komunisto-phobi atau anti-Komunisme seperti di-negara² imperialis. Jang perlu sekarang jalah untuk mendjalankan program bersama itu. Jang perlu sekarang jalah untuk mentjapai pengertian tentang tjara mendjalankan program bersama itu, dan untuk ber-sama² menjingkirkan setiap penghalang terhadap maksud jang mulia itu.

Seperti dikatakan oleh Presiden Sukarno dalam pidato Resopim, tanggal 17 Agustus 1961 : *„Negara dan Rakjat sudah menerima Manipol dengan ketetapan MPRS-nja, maka semua warga sekarang harus dipimpin Manipol. Rakjat sudah dipimpin oleh Manipol, militer djuga harus dipimpin oleh Manipol. Bukan militer atau bedil jang memimpin Manipol tetapi Manipol jang memimpin militer atau bedil”*. (Re-so-pim, Departemen Penerangan, Penerbitan Khusus no. 180, hal. 29). Inilah jang oleh kami kaum Komunis dinamakan „politik adalah djenderal”.

Mari kita bahas sekarang strategi umum Revolusi Indonesia seperti digariskan didalam Manipol. Manipol menjatakan bahwa *„kewadajiban² Revolusi Indonesia jang terpenting jalah membebaskan Indonesia dari semua imperialis dan menegakkan tiga segi kerangka”*. Dan apa jang dimaksudkan dengan tiga segi kerangka itu ?

„Kesatu, Pembentukan satu Negara Republik Indonesia jang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan jang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke”.

Artinja, mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia jang nasional dan demokratis.

„Kedua, Pembentukan satu masjarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu”. Artinja, berharidepan masjarakat Sosialis Indonesia, masjarakat jang adil atau masjarakat jang tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia, sebagai persiapan untuk menudju kemasjarakat adil dan makmur, masjarakat jang oleh kami kaum Komunis dinamakan masjarakat Komunis.

„Ketiga, Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara² Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain dan atas dasar bekerdjasama membentuk satu Dunia Baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna”. (Tubapi, hal. 81). Artinja, mendjalankan politik luarnegeri jang bebas-aktif, jang anti-imperialis, untuk kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian dunia.

Dengan demikian, tiga segi kerangka Manipol memberi gambaran jang sangat djelas tentang sifat masjarakat jang harus dibangun, tentang sifat negara jang diperlukan, tentang pokok² politik dalamnegeri dan luarnegeri daripada negara itu.

Selandjutnja, tentang sifat Revolusi Indonesia, Manipol menjatakan sbb.: „Revolusi Indonesia adalah Revolusi nasional menentang imperialisme-kolonialisme” dan bahwa walaupun „Revolusi Indonesia bersifat multi-complex, tetapi sifat nasio-

nal daripada Revolusi Indonesia adalah sangat menondjol". (Tubapi, hal. 84).

Selanjutnja dikatakan bahwa: „Disamping sifat nasionalnja, Revolusi Indonesia, sebagai dju-ga semua revolusi dizaman modern sekarang, adalah revolusi demokratis. Sifat demokratis daripada revolusi Indonesia dinjatakan oleh tugasnja menentang keterbelakangan feodal dan menentang otoknasi atau kediktatoran, baik militer maupun perseorangan". (Tubapi, hal. 84). Pendeknja, sasaran² pokok Revolusi Indonesia ialah imperialisme dan feodalisme. Revolusi Indonesia adalah revolusi anti-imperialis dan anti-feodal.

Dengan demikian menjadi djelas strategi umum Revolusi Indonesia, jaitu: menghantjurkan imperialisme dan feodalisme, mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia jang nasional dan demokratis, sebagai sjarat mutlak untuk menudju kemasjarakat Sosialis Indonesia.

REVOLUSI INDONESIA REVOLUSI SEMUA KLAS DAN GOLONGAN ANTI-IMPERIALIS

Berdasarkan ini semua, Manipol selanjutnja menetapkan, bahwa „revolusi Indonesia adalah revolusi bersama dari semua klas dan golongan jang menentang imperialisme-kolonialisme" dan bahwa tugas daripada Revolusi Indonesia adalah untuk „mendirikan kekuasaan Gotong-Rojong, kekuasaan demokratis jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan, jang mendjamin terkonsentrasinja

seluruh kekuatan nasional, seluruh kekuatan Rakjat". (Tubapi, hal. 85).

Tugas ini berarti bahwa kekuasaan yang harus didirikan ialah kekuasaan yang bersih dari aspek anti-Rakjat. Tentunya kekuasaan yang mengandung aspek anti-Rakjat tidak bisa diharapkan akan menjamin terkonsentrasinya seluruh kekuatan Rakjat. Bukankah penegasan Manipol ini penegasan yang paling jelas dan tak meragukan lagi tentang tujuan rituling kekuasaan atau aparatur negara? Aspek pro-Rakjat harus diperkuat, dan aspek anti-Rakjat harus dilenyapkan dengan jalan mengusir elemen² anti-Rakjat dari kekuasaan negara. Demikianlah tjara satu²nja dalam melaksanakan Manipol dibidang kekuasaan negara.

Dengan menetapkan pokok² ini, Manipol selanjutnya menetapkan pula tentang kekuatan² sosial daripada Revolusi Indonesia. Dikatakan sbb.: *„Djadi djelaslah bahwa kekuatan² sosial Revolusi Indonesia, jaitu seluruh Rakjat Indonesia dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknya tanpa melupakan peranan penting dari golongan² lain, adalah sangat besar dan meyakinkan akan menangnja Revolusi Indonesia". (Tubapi, hal. 84).* Dan mengapa dikatakan bahwa kaum buruh dan kaum tani merupakan kekuatan pokok? Inipun djuga didjelaskan dalam Manipol sbb.: *„Dengan tidak mengurangi arti dari klas² dan golongan² lain sebagaimana sering di-tekan²kan oleh Presiden Sukarno, kaum buruh dan kaum tani, baik karena vitalnja maupun karena sangat banyak djumlahnja, harus mendjadi kekuatan po-*

kok dalam revolusi dan harus mendjadi soko-guru masyarakat adil dan makmur di Indonesia". (Tubapi, hal. 82). Djadi „karena vitalnja maupun karena sangat banyak djumlahnja". Dan kalau Manipol berbitjara tentang vitalnja kaum buruh dan kaum tani, ini tak lain tak bukan oleh karena kedua klas atau golongan itu merupakan pentjipta² utama kekayaan materiil didalam masyarakat.

BAGIAN TERBESAR ANGKATAN BERSENDJATA ANAK² BURUH DAN TANI

Saja tidak akan djemu²nja menekankan kepada pendjelasan Manipol ini, sebab ada orang jang suka lupa akan vitalnja kaum buruh dan kaum tani, dan jang malahan menganggap kaum buruh dan kaum tani tidak vital, tidak perlu diperhitungkan dan diperhatikan, tidak perlu diikutsertakan, malahan dengan tindakan²nja mereka djustru memberi kesan bahwa jang mereka anggap vital ialah untuk mengindjak hak² kaum buruh dan kaum tani, dan menindas gerakan² mereka. Sikap jang demikian berlawanan dengan Manipol dan berlawanan dengan strategi umum Revolusi Indonesia. Sikap jang demikian, sedar atau tidak, pada dasarnya merupakan sikap jang kontra-revolusioner. Kalau kita sekarang membahas tema politik dan pertahanan, maka dapat ditegaskan bahwa sikap jang demikian tidak boleh diberi tempat dalam aparatur pertahanan kita, lebih² karena bagian terbesar anggota Angkatan Bersendjata kita terdiri dari anak² kaum buruh dan terutama anak²

kaum tani jang „sangat banjak djumlahnja” itu. Pada hakekatnja, Angkatan Bersendjata kita adalah „kaum tani bersendjata”.

Djika telah ditetapkan bahwa Revolusi Indone-sia adalah revolusi bersama dari semua klas dan golongan jang menentang imperialisme, kolonialisme, dan dengan sendirinja djuga neo-kolonialisme, maka mendjadi djelas pula mengapa front persatuan nasional merupakan hal jang mutlak perlu bagi berhasilnja revolusi kita itu. Tentang apa jang dimaksudkan dengan front persatuan nasional, oleh Presiden Sukarno sudah diberikan berbagai rumusan, antara lain „samenbundeling van alle revolutionnaire krachten” (istilah jang dipergunakan didalam pidato Konsepsi Presiden jang diintjapkan pada tanggal 21 Februari, 1957) atau „konsentrasi kekuatan nasional” (istilah jang dipergunakan didalam Manipol). Didalam Manipol, Bung Karno berkata bahwa „*modal pokok bagi tiap² revolusi nasional, menentang imperialisme-kolonialisme ialah konsentrasi kekuatan nasional, dan bukan perpetjahan kekuatan nasional*” (Tubapi, hal. 82).

Djadi, tugas untuk mentjiptakan dan menggalang front persatuan nasional adalah tugas revolusioner, dan sebaliknya, usaha² untuk memetjahbelah front persatuan nasional adalah usaha² kontra-revolusioner.

PANTJASILA ALAT PEMERSATU !

Berbitjara tentang front persatuan nasional tidak bisa dianggap lengkap kalau kita tidak se-

kaligus berbitjara pula tentang Pantja Sila. Mengapa demikian ? Pantja Sila selalu dikemukakan sebagai filsafat negara Republik Indonesia. Ini jalah, karena Pantja Sila djustru mentjerminkan kenja-taan bahwa Rakjat Indonesia meliputi berbagai golongan, sukubangsa serta aliran jang berbeda-beda, sedangkan perbedaan² itu bisa dirumuskan dalam satu rangkaian Sila² jang diakui bersama oleh seluruh bangsa. Djustru karena perbedaan² itu, Rakjat kita membutuhkan Pantja Sila sebagai alat pemersatu. Djustru karena perbedaan² itu, Rakjat Indonesia membutuhkan front persatuan nasional. Ini mentjerminkan toleransi revolusioner jang tinggi jang telah mendjiwai gerakan kemerdekaan nasional Indonesia sedjak semula dan terutama sedjak tahun² duapuluhan.

Djadi filsafat jang digambarkan dalam Pantja Sila itu jalah filsafat persatuan atau *filsafat Gotongrojong*. Dalam pidatonja pada tanggal 1 Djuni 1945 jang berdjedul *Lahirnja Pantjasila*, Bung Karno berkata : „Djikalau saja peras jang lima mendjadi tiga dan tiga mendjadi satu, maka dapatlah saja satu perkataan Indonesia jang tulen, jaitu perkataan 'Gotong-rojong'. Negara Indonesia jang kita dirikan haruslah negara Gotong-rojong !” (*Tubapi*, hal. 37). Oleh karena itulah, Presiden Sukarno selalu dengan tepat menamakan Pantja Sila sebagai alat pemersatu.

Mari kita memperhatikan benar² apa jang dikatakan oleh Presiden Sukarno mengenai hal ini : „Pantja Sila adalah alat pemersatu ! Pantja Sila bukan alat pemetjahbelah ! Dengan Pantja Sila,

kita djuga mempersatukan tiga aliran besar jang bernama Nasakom itu. Djadi, djangan mempergunakan Pantja Sila untuk memetjah-belah Nasakom, mempertentangkan kaum nasionalis dengan kaum agama, kaum agama dengan kaum komunis, kaum nasionalis dengan kaum komunis. Siapa jang main² dengan Pantja Sila untuk maksud² pengadudombaan itu, ia adalah orang jang sama-sekali tak mengerti Pantja Sila atau orang jang durhaka kepada Pantja Sila atau orang jang kepalanja sinting". (Resopim, Departemen Penerangan, Penerbitan Khusus, no. 180, hal. 42).

Bukankah ini suatu penegasan jang se-tegas²-nja? Tanpa tedeng aling². Orang jang memereteli satu Sila untuk mengadu salahsatu aliran revolusioner dengan aliran revolusioner lainnja dalam masjarakat adalah orang jang tidak mengerti Pantja Sila atau orang jang durhaka kepada Pantja Sila atau orang jang ... kepalanja sinting. Demikianlah penilaian jang sewadjarnja terhadap orang² jang mempergunakan Pantja Sila sebagai alat pemetjah-belah.

NASAKOM POROS PERSATUAN NASIONAL

Dan jang sangat penting pula diperhatikan jalah bahwa kalau Bung Karno menamakan Pantja Sila sebagai alat pemersatu, jang dimaksudkan djustru jalah alat pemersatu antara tiga aliran besar jang hidup didalam masjarakat Indonesia, jaitu Nasionalisme, Agama dan Komunisme, atau jang dipersatukan dalam istilah NASAKOM. NASA-

KOM djuga merupakan bagian daripada filsafat persatuan atau filsafat Gotongrojong Rakjat Indonesia sebab, seperti dikatakan oleh Bung Karno (djuga dalam pidato Resopim, hal. 39-40) „Nasakom adalah kenjataan² hidup jang ta' dapat dibantah... didalam masjarakat Indonesia". Gagasannya Nasakom mempunjai akar-sedjarahnja sedjak lahirnja perdjjuangan kemerdekaan nasional, perdjjuangan revolusioner Rakjat Indonesia sedjak tahun² duapuluhan. Hal ini dibuktikan antara lain oleh tulisan Bung Karno dalam tahun 1926 jang berdjjudul „*Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme*” (*Dibawah Bendera Revolusi* hal. 1-23). Sedjarah gerakan kemerdekaan Indonesia adalah sedjarah berkembangnja tiga aliran ini, sedjarah persatuan antara tiga aliran ini. Dan sedjarah itu membuktikan bahwa selama tiga aliran itu bersatu, maka djalannja gerakan revolusioner kita lantjar, sedangkan djika tiga aliran itu terpetjah, maka gerakan revolusioner kita berdjalan seret. NASAKOM adalah poros daripada front persatuan nasional kita. Menerima Pantja Sila harus menerima Nasakom. Mengenai hal ini Bung Karno telah berkata dalam pidato Re-so-pim sbb. :

„Siapa jang setudju kepada Pantjasila, harus setudju kepada NASAKOM, siapa jang tidak setudju kepada NASAKOM sebenarnya tidak setudju kepada Pantjasila. Sekarang saja tambah. Siapa setudju kepada Undang² Dasar '45 harus setudju kepada NASAKOM, siapa jang tidak setudju kepada NASAKOM sebenarnya tidak setudju kepada Undang² Dasar '45”. (Resopim, hal.

40). Kutipan ini benar² menggambarkan kesatuan yang mutlak antara Revolusi '45 yang mendjiwai Undang² Dasar '45 dengan Pantjasila dan Nasakom. Memang durhaka atau sinting orang² yang sampai sekarang tetap tidak mengerti atau tidak mau mengerti kebenaran yang sedemikian sederhana ini.

DUA TAHAP REVOLUSI INDONESIA

Selanjutnya, jika kita mau mengerti sejarah mendalam mengenai strategi umum Revolusi Indonesia, kita harus mengerti bukan hanya mengenai sasaran pokoknya, mengenai tugas-kewajibannya, mengenai kekuatan sosialnya, tetapi harus juga kita mengerti bahwa Revolusi Indonesia adalah revolusi yang berdjalan melalui dua tahap. Soal ini sebenarnya sudah djelas dari Manipol sendiri, kemudian diperdjelas lebih lanjut oleh Bung Karno didalam pidato Djarek, dan penegasan yang paling lengkap dikemukakan didalam Deklarasi Ekonomi (Dekon) dalam hubungan dengan strategi dasar ekonomi Indonesia. Disitu dikatakan bahwa :

„Perlu disadari dan difahami bahwa strategi dasar ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari strategi umum revolusi Indonesia” dan bahwa „Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia maka dalam tahap pertama kita harus membangun susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa² imperialisme dan bersih dari sisa² feodalisme. Tahap pertama ada-

lah persiapan untuk tahap kedua, yaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa *l'exploitation de l'homme par l'homme*" (Dekon, fasal 3). Dekon djuga mengatakan dalam fasal 4 bahwa „Kita sekarang berada dalam tahap pertama Revolusi kita”.

Dengan penegasan jang demikian, maka Dekon setjara ilmiah mengupas segi jang mutlak daripada Revolusi kita. Ia mengupas setjara kongkrit djalan jang harus dilalui untuk bisa sampai kepada tudjuan kita, yaitu masyarakat Sosialis Indonesia. Mengapa tahap nasional-demokratis itu harus dilalui dan diselesaikan sebelum bisa mulai dengan pembangunan ekonomi Sosialis? Tidak bisa diharapkan bahwa dalam masyarakat dimana masih terdapat sisa² imperialisme, artinja masyarakat jang belum merdeka penuh, dan masih terdapat sisa² feodalisme, akan terbuka kemungkinan untuk membangun Sosialisme. Tidak ada hal jang lebih dibentji oleh kaum imperialis daripada Sosialisme; djadi dengan sendirinja sisa² imperialisme merupakan halangan terpenting bagi Sosialisme. Inilah sebabnja mengapa sisa² itu harus dibersihkan dulu; inilah sebabnja mengapa masyarakat atau ekonomi nasional jang bersih dari sisa² imperialisme harus dibangun lebih dulu, baru bisa dimulai pembangunan masyarakat atau ekonomi Sosialis.

Demikian pula, sisa² feodalisme djuga merupakan rintangan mutlak terhadap pembangunan Sosialisme. Tak mungkin samasekali dibayangkan bahwa didalam masyarakat dimana tanah, salah-

satu alat produksi terpenting, masih dimiliki se-tjara monopoli oleh tuantanah², dimana kerdja-lebih atau hasil-lebih daripada kaum tani dirampas oleh tuantanah², akan terbuka kemungkinan untuk melaksanakan pembangunan Sosialis. Tuntutan kaum tani akan tanah harus dipenuhi lebih dulu supaya kaum tani sendiri bisa dimobilisasi untuk ikut membangun ekonomi jang madju, jang ber-industri, sehingga sektor pertanian dan perkebunan dapat menjadi dasar jang kokoh djustru karena tenaga² produktif telah dibebaskan dari hubungan-hubungan produksi jang bersifat feodal itu, telah dibebaskan dari penghisapan feodal.

Djadi, sifat ilmiah rumusan Dekon tentang adanya dua tahap revolusi itu terletak dalam kenyataan bahwa ia menundjukkan djalan untuk mentjapai Sosialisme jang merupakan haridepan atau perspektif dari Revolusi Indonesia. Djustru karena Sosialisme merupakan perspektif revolusi kita, maka tahap nasional dan demokratis atau tahap menghantjurkan imperialisme dan sisa² feodalisme harus dilalui lebih dahulu.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN MASJARAKAT SOSIALIS DAN MASJARAKAT KOMUNIS

Masih ada satu hal lagi jang perlu saja djelaskan dalam hubungan ini. Ada orang jang merasa tjuriga djika mendengar orang Komunis berbitjara tentang pembangunan masjarakat Sosialis karena mengira bahwa ini suatu tipu-muslihat; sebenarnya, kata mereka, kaum Komunis bukan mau mem-

bangun masjarakat Sosialis melainkan masjarakat Komunis. Seakan-akan masjarakat Komunis berlainan samasekali dengan masjarakat Sosialis, bahkan seakan-akan bertentangan! Anggapan jang demikian adalah samasekali keliru, karena walaupun memang ada perbedaan tertentu antara dua matjam masjarakat itu, namun kedua-duanja itu sesungguhnya merupakan satu tjara produksi, satu djenis susunan masjarakat. Dua²nja merupakan masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia. Bedanja ialah, bahwa masjarakat Sosialis merupakan tingkat pertama dimana taraf produksi belum mentjukupi untuk memenuhi setjara berlimpah² semua kebutuhan manusia. Djadi distribusi hasil² produksi diatur sesuai dengan sumbangan masing² orang didalam masjarakat terhadap usaha² produktif atau dengan perkataan lain: *„Setiap orang bekerdja menurut kesanggupannya, setiap orang menerima menurut hasil kerdjanya”*. Sedangkan dalam masjarakat Komunis, jang hanja mungkin ditjapai sesudah selesai pembangunan Sosialisme, tingkat produksi telah sedemikian tinggi sehingga semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Dalam masjarakat jang demikian, masing² orang menjumbangkan kepada usaha² produktif menurut kemampuannya sedangkan distribusi hasil² produksi sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan² masing² orang atau dengan perkataan lain: *„Setiap orang bekendja menurut kesanggupannya, setiap orang menerima menurut kebutuhannya”*.

Dengan demikian, masjarakat Sosialis merupa-

kan masjarakat jang adil dalam arti masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia, tetapi belum makmur atau belum begitu makmur. Sedangkan masjarakat Komunis merupakan masjarakat jang adil *dan* makmur; adil karena tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia, dan makmur karena taraf produksi jang sudah ditjapai adalah sangat tinggi, produksi barang² sudah berlimpah².

PEMILIKAN PERSEORANGAN ATAS ALAT² PRODUKSI SUMBER PENGHISAPAN

Karena masjarakat Sosialis merupakan perspektif Revolusi Indonesia, maka dengan sendirinja kita sering berbitjara tentang masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia, Bung Karno ber-ulang² menekankan kepada prinsip ini karena memang inilah hakekat masjarakat Sosialis. Tapi sajangnja, ternjata bahwa masih ada sджа orang jang tidak mengerti apa sebenarnja jang dimaksudkan dengan masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia. Mereka tidak mengerti hal ini karena pada pokoknja mereka tidak mengerti hakekat daripada penghisapan atas manusia oleh manusia itu sendiri. Penghisapan, atau dalam kata² lain, *perampasan oleh seseorang terhadap hasil-lebih atau kerdja-lebih orang lain*, timbul dari hubungan produksi, artinja dimana satu fihak memiliki alat² produksi dan fihak jang lain tidak memiliki alat² produksi. Dengan adanja hubungan produksi ini, maka fihak jang memiliki

alat² produksi dapat merampas hasil-lebih atau kerdja-lebih dari fihak jang tidak memilikinja jang terpaksa mengadakan hubungan kerdja dengan pemilik² alat² produksi itu.

Dalam masjarakat perbudakan, pemilik budak memiliki manusia lain sedangkan budak² tidak memiliki apa², pun tidak memiliki djiwa-raganja sendiri, sehingga seluruh hasil-kerdja sibudak itu dirampas, dan hanja sedikit dikembalikan kepadanya sekedar agar supaya djangan sampai dia lekas mati. Dalam masjarakat feodal, tuantanah memiliki tanah sedangkan kaum tani-hamba tidak memiliki apa², sehingga tuantanah dapat memaksa kaum tani untuk bekerdja ditanahnja dengan menjerahkan semua hasil-lebih kepada tuantanah dalam bentuk sewa-tanah. Dalam masjarakat kapitalis, alat² produksi dimiliki seluruhnja oleh kaum kapitalis sehingga mereka bisa memaksa kaum buruh jang tidak memiliki alat² produksi apapun untuk bekerdja baginja sehingga kaum kapitalis dapat merampas kerdja-lebih jang dihasilkan oleh kaum buruh itu. Pada tingkat perkembangan tenaga² produktif dewasa ini manusia jang bekerdja selalu dapat menghasilkan sesuatu jang nilainja melebihi nilai daripada tenaga kerdja manusia itu sendiri. Bagian jang melebihi nilai tenaga kerdjanja sendiri berbentuk kerdja-lebih atau hasil-lebih, jang oleh Marx dinamakan nilai-lebih (surplus value, mehrwert), dan inilah jang dirampas oleh mereka jang memiliki alat² produksi.

Djadi, hakekat daripada penghisapan atas manusia oleh manusia ialah bahwa satu fihak me-

miliki alat² produksi sedangkan fihak lain tidak. Hakekatnja ialah pemilikan perseorangan atas alat² produksi. *Hanja masjarakat dimana sudah tidak terdapat lagi pemilikan perseorangan atas alat² produksi, artinja dimana alat² produksi dimiliki oleh masjarakat seluruhnja, oleh negara, dimana alat² produksi mendjadi milik Rakjat pekerdja, bisa bebas dari penghisapan atas manusia oleh manusia.* Djika alat² produksi dimiliki oleh masjarakat (pemilikan sosial), maka hasil-lebih atau kerdja-lebih akan dipergunakan oleh masjarakat itu sendiri dan sebagian akan dibagi kembali melalui distribusi pendapatan nasional sedangkan bagian selebihnja dipergunakan untuk memperluas tingkat produksi agar bisa mentjapai kesedjahteraan materiil dan spirituul jang lebih tinggi dikemudian hari. *Hanja dalam masjarakat tanpa pemilikan perseorangan terhadap alat² produksi dapat ditjapai distribusi pendapatan nasional jang adil, artinja tanpa rampasan nilai-lebih, tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia. Inilah hubungan mutlak antara masjarakat adil dengan masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia.* Djika masih terdapat pemilikan perseorangan atas alat² produksi, maka akan terdapat pula penghisapan atas manusia oleh manusia.

Tentu, kalau saja hitjara tentang pemilikan perseorangan saja selalu tekankan bahwa jang dimaksudkan ialah pemilikan atas alat² produksi. Pemilikan barang² pribadi, jang dipergunakan untuk konsumsi sendiri, dengan sendirinja tidak membuka kemungkinan untuk adanja penghisap-

an; djadi pemilikan perseorangan terhadap barang² jang demikian tidak berlawanan dengan prinsip „tanpa penghisapan” itu.

UNTUK MENGETRI SOSIALISME, PELADJARI MARXISME !

Baru beberapa hari jang lalu, jaitu pada tanggal 9 Djuli, 1963, Presiden Sukarno, ketika bitjara dimuka para mahasiswa Universitas Indonesia, menekankan bahwa djika kita mau membangun Sosialisme, kita harus membatja „Das Kapital”-nja Karl Marx, dan paling sedikit „Manifesto Komunis” karjanja Marx dan Engels. Saran Bung Karno sungguh tepat sekali, sebab didalam buku² itulah akan dapat kita mengetahui apa jang sebenarnja dimaksudkan dengan masjarakat Sosialis. Ulasan saja diatas jalah djustru adjaran Karl Marx didalam buku² jang disebut oleh Bung Karno itu.

Memang benar, kalau kita bertudjuan membangun Sosialisme, kita harus mempeladjadi Marxisme. Kalau jang mau dibangun jalah kapitalisme, maka jang harus dipeladjadi dan diamalkan bukan Marxisme, tetapi adjaran² Alfred Marshall, Lord Keynes, dan lain² ahli² ekonomi sematjam itu. Tetapi tudjuan kita bukanlah kapitalisme melainkan Sosialisme dan seperti baru² ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio, tak mungkin kita sekaligus anti-kapitalisme dan anti-Marxisme, sebab setjara objektif anti-Marxisme berarti membantu kapitalisme sedang-

kan Marxisme berarti menolak dan mengalahkan kapitalisme dan membangun Sosialisme.

Sebelum saja mengachiri bagian pertama dari tjeramah ini, saja ingin mengupas setjara singkat beberapa hal jang berhubungan dengan masalah negara. Hal ini saja anggap penting karena Angkatan Laut R.I., ber-sama² dengan Angkatan Bersendjata lainnja, adalah salahsatu dari alat² negara, dan bahkan sering dikatakan alat revolusi. Alat² negara harus mengerti politik karena alat² negara, seperti kita semua, harus dipimpin oleh politik. Tapi tidak hanja itu. Alat² negara harus pula mengerti tentang negara karena mereka merupakan sebagian daripada negara.

KEKUASAAN NEGARA HARUS SEPENUHNJA DITANGAN KAUM REVOLUSIONER

Negara adalah alat daripada golongan jang berkuasa didalam masjarakat untuk melakukan kekuasaannja itu. Djadi, negara adalah alat klas. Seperti telah saja djelaskan, revolusi ditudjukan untuk mengubah hubungan² produksi, jaitu untuk mengubah susunan ekonomi, susunan masjarakat. Djika klas atau klas² (dalam hal negeri kita, seluruh Rakjat jang anti-imperialis) jang sedang berevolusi berhasil memegang kekuasaan itu, maka negara akan dapat mengahdi sepenuhnya kepada revolusi itu. Hanja djika kekuasaan negara berada didalam tangan kaum revolusioner, baru kita dapat berkata tentang negara sebagai alat revolusi. Tetapi djika negara masih dikuasai oleh

klas² jang menentang revolusi, oleh kaum reaksi-
oner, maka negara menghambat revolusi atau men-
djadi alat kontra-revolusi.

Seperti kita sama² mengetahui, negara Republik
Indonesia lahir dalam perdjjuangan revolusioner,
djadi seharusnya mengabdikan kepada revolusi. Te-
tapi seperti kita sama² mengetahui, revolusi In-
donesia belum selesai walaupun sudah hampir 18
tahun sedjak Proklamasi Negara Republik Indo-
nesia. Pengalaman² kita memang menunjukkan
bahwa negara kita tidak selalu atau tidak seluruh-
nja mengabdikan kepada revolusi. Seandainya ia se-
lalu atau seluruhnja mengabdikan kepada revolusi,
sudah tentu revolusi kita sudah lama selesai.

Tetapi sebaliknya, negara kita itu djuga tidak
selalu atau seluruhnja menghambat revolusi. Sa-
masekali tidak. Djadi, ada *dua segi* dalam kekua-
saan negara Republik kita, jaitu ada segi pro-
Rakjat tapi ada djuga segi anti-Rakjat. Segi pro-
Rakjat mendorong dan mengabdikan kepada revolusi,
sedangkan segi anti-Rakjat menghambat revolusi.
Ini berarti bahwa djika kita mau membikin negara
Republik kita sepenuhnya dan selalu mengabdikan ke-
pada revolusi — dan memang itulah jang harus
mendjadi tudjuan setiap orang revolusioner —
maka segi anti-Rakjat harus dilenjapkan dan segi
pro-Rakjat harus dimenangkan. Ini berarti, kita
harus melenjapkan segi kontra-revolusioner dan
memenangkan segi revolusioner. Tudjuan ini ha-
rus ditjapai antara lain melalui rituling aparat ne-
gara. Dengan demikian rituling adalah satu tugas
revolusioner, satu keharusan, sesuatu jang mutlak
perlu djika revolusi kita mau diselesaikan.

RITULING MUTLAK PERLU UNTUK REVOLUSI-KOMPLIT

Seperti dikatakan oleh Bung Karno dalam pidato Djarek (17 Agustus, 1960), rituling aparat negara harus ditudjukan kepada „orang² jang otak dan hatinja telah berdaki berkarat tak dapat menjesuaikan diri dengan Manipol-Uldek. Sungguh alat² jang lama itu harus kita ritul”. (Tubapi, hal. 211). Artinja rituling harus ditudjukan kepada orang jang tak dapat menjesuaikan diri dengan revolusi kita. Rituling jang demikian, kata Bung Karno dalam Djarek, adalah bagian dari „Revolusi-Komplit jang kita lakukan, jaitu Revolusi penuh dari atas dan dari bawah”. Djadi, tanpa rituling aparat negara, Revolusi Indonesia tidak bisa komplit.

Dan apa jang dimaksudkan oleh Bung Karno dengan „revolusi dari atas dan dari bawah”? Saja kutip lagi dari pidato Djarek itu, sbb. : „Dari atas, dengan adanja rituling terhadap aparat dan sistim; dari bawah, karena rituling aparat negara dan sistim itu dilakukan sesuai dengan desakan Rakjat dan didukung pula oleh Rakjat. (Tubapi, hal. 241).

Desakan Rakjat Indonesia pada saat ini agar kegotongrojongan nasional jang berporoskan NASAKOM ditjapai disemua bidang, termasuk pula dibidang eksekutif, jalah desakan jang sepe-nuhnja sesuai dengan apa jang dinamakan oleh Bung Karno sebagai rituling jang merupakan bagian mutlak daripada Revolusi-Komplit kita.

Demikianlah, beberapa hal yang ingin saja sampaikan pada kesempatan ini mengenai politik. Saja sengadja membahas masalah ini agak pandjang dan memberi perhatian kepada hal² yang bisa dikatakan sangat pokok, hal² yang bahkan bersifat elementer. Kadang² hal yang elementer dalam kenyataan sering tidak dimengerti atau pura² tidak dimengerti, pun oleh orang² yang membanggakan dirinja sebagai orang² politikus yang hebat, sehingga akibatnja, semua hal yang bersangkutan dengan revolusi mendjadi kabur dan meleset. Tidak salah kiranja kalau dari waktu kewaktu kita kembali kepada soal² yang elementer itu untuk membikin segar kembali pengertian kita tentang revolusi kita.

II. BEBERAPA SOAL TENTANG PERTAHANAN

Djika hal² mengenai politik sudah djelas, tidak akan sulit kiranya untuk mengadakan pembahasan tentang masalah pertahanan. Sama halnya seperti di-bidang² lain, djuga dibidang pertahanan politik memegang peranan memimpin, politik adalah djen-deral. Kita harus dipimpin oleh politik. Untuk kita di Indonesia, ini berarti bahwa pertahanan nasional kita harus dipimpin oleh Manifesto Politik karena itulah politik kita, politik revolusi kita. Pertahanan yang didjalankan oleh Angkatan Bersendjata Republik Indonesia mempunyai tugas pokok untuk menjelamatkan dan memenangkan Revolusi. Oleh karena itu, Angkatan Bersendjata RI harus diatas segala-galanya berdiri dilihak Rakjat. Angkatan Bersendjata RI harus konsekwen anti-imperialis dan anti-feodal. Pertahanan nasional RI harus konsekwen anti-imperialis dan anti-feodal.

DWITUNGGAL ANGKATAN BERSENDJATA DAN RAKJAT UNTUK REVOLUSI

Sudah sedjak lama kaum Komunis Indonesia menjerukan dan mendjundjung tinggi sembojan: *Dwitunggal Angkatan Bersendjata dan Rakjat*. Hal ini menggambarkan hakekat daripada hubungan pertahanan dengan politik. Gagasan dwitung-

gal ini bisa didjelaskan pula sebagai hubungan antara ikan dengan air. Airnja adalah Rakjat. Sudah djelas, ikan tak mungkin hidup diluar air. Tetapi djuga didalam air, djika airnja beratjun, ikan tidak bisa hidup. Bagi Angkatan Bersendjata, Rakjat jang terpetjahbelah adalah bagaikan air beratjun bagi ikan. Oleh karena itu sembojan *Dwitunggal Angkatan Bersendjata dan Rakjat* hanja bisa mendjadi realitet djika semua fihak tanpa perketjualian mendjaga air itu supaya bersih, bersih dari segala matjam ratjun jang berupa Komunisto-phobi, massa-phobi dll.

Sembojan *Dwitunggal Angkatan Bersendjata dan Rakjat* sebenarnja sudah lama mendjadi sembojan populer di Indonesia. Tapi harus kita akui bahwa sembojan itu tidak selalu diberi pengertian jang tegas dan benar. Ada orang jang mengira bahwa *Dwitunggal Angkatan Bersendjata dan Rakjat* atau hubungan ikan dengan air bisa diwudjudkan djika Angkatan Bersendjata „hidup di-tengah² Rakjat“. Hal ini sudah tentu sangat penting, sebab Angkatan Bersendjata jang mendjadi bagian daripada revolusi Rakjat benar² harus mendjadi bagian takterpisahkan dari Rakjat itu. Tetapi djangan kita membatasi hubungan dwitunggal ini kepada sekedar „hidup di-tengah² Rakjat“. Maksudnja djauh lebih mendalam lagi, jaitu Angkatan Bersendjata harus *terdiri dari Rakjat, mengabdikan kepada Rakjat dan berdjjuang untuk Rakjat*. Ini tak lain berarti bahwa Angkatan Bersendjata harus mengabdikan kepada revolusi dan berdjjuang untuk revolusi, artinja tunduk kepada

strategi umum Revolusi Indonesia.

Mengenai hal ini Presiden Sukarno berkata sbb. dalam pidato Re-so-pim : „Mereka (artinya Angkatan Bersendjata, DNA) adalah alat Revolusi, mereka adalah Angkatan-Bersendjatanja Revolusi, Mereka harus setia kepada sumbernja, yaitu Revolusi, yaitu Rakjat. Mereka harus mengabdikan kepada Rakjat, mendahulukan kepentingan Rakjat daripada kepentingan lain². Mereka ta' boleh melukai perasaan Rakjat, mereka harus menjadi Angkatan Bersendjata jang disukai dan ditjintai Rakjat Bedil ditangan Angkatan Bersendjata harus ibarat bedil ditangan Rakjat, untuk melindungi hak² Rakjat dan untuk mempertahankan Negaranja Rakjat dan Revolusinja Rakjat. Dalam Revolusi kita sekarang ini, dan seterusnya, tidak boleh ada pertentangan atau kontradiksi antara Angkatan Bersendjata dan Rakjat !” (Re-so-pim, hal. 37-38)

Djadi, ini semua bukan sekedar suatu hubungan jang harus diadakan diantara Angkatan Bersendjata dengan Rakjat. Ini harus menjadi doktrin Angkatan Bersendjata jang mendjiwai seluruh aparat pertahanan kita.

Angkatan Laut kita jang sudah memainkan peranan jang vital dalam perdjjuangan untuk menumpas pemberontakan PRRI-Permesta dan jang telah setjara berani mengambil bagian dalam perdjjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari pendjadjahan Belanda, telah setjara njata mengabdikan kepada Rakjat dan berdjjuang untuk Rakjat.

Pradjurit² ALRI tak lain tak bukan adalah anak² Rakjat, terutama kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota, dsb. Bintara² dan perwira² ALRI djuja pada umumnya berasal dari Rakjat.

Pengertian tentang doktrin Angkatan Bersendjata seperti saja kemukakan diatas sudah saja adjukan pula beberapa minggu jang lalu ketika saja berbitjara dimuka Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD). Memang, menurut pendapat saja, soal doktrin ini adalah sama untuk semua Angkatan Bersendjata kita. Hanja djika semua Angkatan Bersendjata didjiwai oleh satu doktrin dapat kita berbitjara tentang adanja satu doktrin pertahanan nasional, tentang adanja pertahanan nasional jang mengabdikan kepada revolusi. Ini merupakan satu²nja dasar jang kokoh untuk mentjapai kesatuan dan kordinasi jang efektif dan stabil antara keempat Angkatan Bersendjata kita.

Karena letak dan susunan geografisnja, Indonesia memerlukan pertahanan baik didarat, dilaut maupun diudara. Kesatuan dan kordinasi jang efektif dan sikap hormat-menghormati antara keempat Angkatan Bersendjata, merupakan hal jang sungguh menentukan sekali. Tak dapat dibenarkan djika terhadap salahsatu Angkatan diberikan kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah.

JANG PRIMER POLITIK, BUKAN GEOGRAFI

Sistim pertahanan nasional negeri kita, seperti halnja untuk setiap negeri, sudah dengan sendirinja tidak bisa dilepaskan dari letak dan susunan

geografis negeri kita. Hal² itu mempunyai konsekwensi² jang penting bagi struktur pertahanan nasional. Negeri kita terletak dipersimpangan djalan antara dua samudera, dan seakan-akan menjadi batu lontjatan antara daratan Asia dengan Australia. Tapi hal letak ini bukan hanja masalah ilmu bumi melainkan pula masalah politik karena seperti kita ketahui negara² tetangga kita jang paling dekat atau negeri² jang menguasai lautan jang mengelilingi kita adalah negara² jang terikat, langsung atau tidak, dengan SEATO, itu pakt agresif imperialis jang didirikan oleh kaum imperialis AS. Karena ini, Indonesia selamanya menghadapi tekanan² jang sangat kuat untuk mengubah politik luarnegerinja jang tegas anti-imperialis dan untuk menggabungkan diri dengan SEATO.

Susunan geografis negeri kita sebagai negeri kepulauan jang sangat luas djuga mempunyai arti jang besar karena mengharuskan kita untuk memberikan tekanan jang istimewa pada kebutuhan memelihara dan memperkuat hubungan², baik dilaut maupun diudara, antara pulau² seluruh tanah-air. Tapi hal bentuk dan luas inipun bukan hanja masalah ilmu bumi, melainkan pula masalah politik, karena kaum reaksi dan kontra-revolusi selalu berusaha mempergunakan fakta ini untuk maksud² djahat mereka dalam menggerowoti kesatuan negeri kita.

Pandangan jang saja kemukakan ini hendaknja djangan disamakan dengan pandangan geo-politik jang terkutuk itu. Letak dan bentuk geografis negeri kita harus diperhatikan dan dipergunakan

dengan sebaik-baiknya dengan tujuan pokok untuk mengabdikan kepada revolusi. Jadi, yang pertama² adalah revolusi, bukan geografi. Pandangan geo-politik sebaliknya berdasarkan segala sesuatu kepada letak dan susunan geografis sesuatu negeri. Pada azasnya, pandangan geo-politik, yaitu penggunaan ilmu bumi untuk menentukan strategi dan politik, bertujuan membenarkan ekspansi bagi negara² imperialis dan sebaliknya bagi negara³ yang menjadi objek ekspansi imperialis itu geo-politik bertujuan membenarkan kapitulasi atau politik-menjerah kepada ekspansi imperialis itu. Karena itu, geo-politik sepenuhnya merupakan pandangan yang mengabdikan kepada imperialisme.

Salah satu exponent utama pandangan geo-politik ini ialah *Sir Halford John MacKinder* (1861-1947) seorang ahli ilmu bumi Inggris. Menurut teori MacKinder siapa yang berhasil menguasai apa yang dia namakan „bulan sabit luar“ (outer crescent), yaitu kepulauan² yang berdekatan dengan pantai daratan-luas Eropa-Asia (Inggris sendiri, Lautan Tengah, kepulauan² dilautan Hindia, kepulauan Indonesia, Filipina sampai ke Jepang), dan juga dapat menguasai apa yang dinamakan „bulan sabit dalam“ (inner crescent), yaitu negara² yang terletak ditepi daratan-luas Asia-Eropa itu (termasuk Eropa, Timur Tengah, India, dan Tiongkok) akan berhasil pula menguasai apa yang dia namakan „daerah poros“, „daerah-djantung“ atau „heartland“, yaitu Rusia (sekarang Uni Sovjet), dan akan juga berhasil menguasai seluruh dunia.

Pandangan geo-politik juga diperkembangkan

oleh seorang militeris Djerman, *Karl Haushofer* (1869-1946) seorang inspirator utama politik ekspansionisme kaum fasis Djerman. Berdasarkan suatu pembagian dunia yang setjara se-wenang² dia mendesak supaya dunia ditempatkan dibawah kekuasaan Djerman dan Djepang.

Kaum militeris Amerika Serikat djuga sangat sibuk dengan memperkembangkan pandangan geo-politik, misalnja *Nichols Spykman*, yang djustru banyak mempergunakan teori MacKinder untuk mengilhami politik agresi imperialis Amerika Serikat guna mengepung Uni Sovjet, negeri Sosialis pertama didunia, dengan pangkalan² perang dan guna berusaha menghantjurkan negeri Sosialis itu.

PANDANGAN GEO-POLITIK BERTENTANGAN DENGAN PANDANGAN REVOLUSIONER

Indonesia harus mempunjai strategi dan politik yang tegas didasarkan pada kebutuhan² revolusi kita. Pandangan² geo-politik samasekali tidak boleh diberi tempat dalam rangka teori pertahanan nasional negeri kita, ataupun dalam menentukan politik luarnegeri kita. Kontradiksi yang sangat tajam antara pandangan geo-politik dengan pandangan revolusioner terhadap doktrin pertahanan dapat dirasakan dengan djelas sekali djika kita membatja buku Djenderal Major Simatupang, *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*. Djenderal Major ini djelas mendjadikan dirinja seorang exponen geo-politik dengan mengatakan bahwa : „pengaruh faktor ilmu bumi dalam politik

suatu negara pada pokoknja adalah lebih kuat daripada faktor ideologi". (hal. 132). Lebih kuat dari faktor ideologi tidak bisa lain djuga berarti lebih kuat dari faktor politik. Geo-politik bisa sangat membahayakan negara dan revolusi kita karena, berdasarkan pandangan jang demikian, ada sadsja orang² jang berusaha mendjiwai politik nasional dan internasional kita dengan sikap menjerah, sikap takut, sikap jang melihat semua perkembangan se-akan² sebagai perkembangan politik kekuasaan, dan oleh karenanja akan menempatkan kita hanya pada satu kemungkinan, jaitu menyesuaikan diri dengan perebutan kekuasaan ('perang dingin') ini. Dapat kita membatja, misalnja, didalam bukunya Djenderal Major Simatupang itu, bahwa *„dunia masih tetap dikuasai oleh politik kekuasaan, oleh ketakutan untuk dikepung dan diserang, sehingga semuanya merasa dirinja terpaksa untuk mengadakan persekutuan jang harus mengimbangi bahaya serangan jang dichawatirkan"*. (hal. 143). Dari sini djelas sekali bahwa bagi negeri jang menjadi objek politik ekspansi, seperti Indonesia, geo-politik dipergunakan untuk menimbulkan rasa takut, rasa-menjerah, dan lebih dari itu, untuk membenarkan persekutuan² atau blok² militer jang agresif dan bahkan guna membenarkan supaya Indonesia ikut didalam sesuatu blok itu.

Setjara praktis, sikap ini tentu membawa mereka jang bersikap demikian kepada kesimpulan² tentang politik luar dan dalam negeri jang sangat bertentangan dengan politik kita berdasarkan halsuan negara kita, Manifesto Politik. Pandangan

geo-politik Djenderal Major Simatupang membawa kepada kesimpulan² tentang politik luar-negeri kita sbb.:

„Apa jang dapat kita djalankan jalah berusaha, agar diantara negara² didaratan Asia dan kita sendiri selalu terdapat persahabatan dan agar suasana dalam hubungan negara² didaratan Asia itu dengan kita dan diantara mereka djangan sampai diliputi oleh semangat politik kekuasaan, melainkan oleh semangat saling hormat-menghormati terhadap kedaulatan masing²” (hal. 149). Politik jang demikian samasekali memisahkan politik luar-negeri kita dari tudjuan Revolusi Indonesia. Dasar³ politik luar-negeri Republik Indonesia sudah terang anti-imperialisme, anti neo-kolonialisme dan pro-perdamaian, atau menurut kerangka ketiga Manipol: *„persahabatan baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara² Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati dan atas dasar bekerdjasama membentuk satu Dunia Baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna”*. (Tubapi, hal. 81).

PANDANGAN GEO-POLITIK MENGEHIRI POLITIK LUARNEGERI KITA JANG ANTI-IMPERIALIS

Pandangan geo-politik mengehiru politik luar-negeri kita karena meniadakan *tjiri anti-imperialisnja* jang merupakan *tjiri* terpokok. Soal mendjadi tetangga, demikian pula soal persamaan ras atau berasal dari satu rumpun bangsa tidak bisa diper-

gunakan sebagai dasar bagi politik luarnegeri kita. Hendaknja hal ini diperhatikan benar dalam menghadapi usaha² jang sedang dilakukan untuk menjapai kerdjasama jang berbentuk suatu konfederasi jang dinamakan Maphilindo. Sudah djelas, bahajanja jalah bahwa dasar „tetangga”, „satu ras” atau „berasal dari satu rumpun bangsa” berarti mengebiri politik konfrontasi kita terhadap komplotan agresif kaum imperialis dengan kaum reaksioner Malaya untuk mendirikan suatu federasi Malaysia jang neo-kolonialis. Ia djuga berarti mengebiri politik dukungan penuh „as a matter of principle” terhadap perdjjuangan kemerdekaan Rakjat Kalimantan Utara jang telah menjatakan hak menentukan nasib sendiri dengan memproklamasikan Negara Kesatuan Kalimantan Utara pada tanggal 8 Desember 1962. Penegasan kembali oleh Bung Karno beberapa hari jang lalu didalam resepsi penutupan Kongres Partai Katolik dan kemudian dihadapan para perwira SESKOAD tentang politik konfrontasi Indonesia terhadap pembentukan Malaysia setjara logis berarti bahwa sudah lebih tidak ada dasar untuk melandjutkan KTT Tiga Negara jang direntjanakan di Manila tanggal 30 Djuli nanti.

Bahwasanja pandangan geo-politik mengakibatkan politik menjerah kepada agresi imperialis dapat pula kita lihat dari kesimpulan berikutnya jang ditarik oleh Djen-Major Simatupang dalam bukunya jang telah saja kutip diatas, dimana dia menulis selandjutnja bahwa „sebagai negara maritim

harus djuga kita usahakan hubungan persahabatan dengan negara² jang menguasai lautan disekitar negeri kita". (hal. 149). Kesimpulan ini sungguh suatu kesimpulan jang menimbulkan kemarahan dalam hati tiap² patriot Indonesia. Siapa negara² jang menguasai lautan disekitar negeri kita kalau bukan negara² SEATO? Politik matjam apa ini, jang menetapkan bahwa kita harus bersahabat dengan negara² SEATO, dengan alasan bahwa mereka mengelilingi negeri kita? Tak lain, ini politik kapitulasi. Padahal, djustru karena negara-negara SEATO mengelilingi kita, kita harus menganggap mereka sebagai musuh jang berbahaya. Bukankah sikap kapitulasi ini suatu tantangan tegas terhadap sikap Rakjat Indonesia jang sudah sedjak dahulu menolak untuk mengadakan persahabatan dengan SEATO, jang menolak dengan tegas untuk diseret kedalam blok SEATO jang imperialis dan agresif itu?

KONSEPSI MARITIM KITA HARUS TEGAS REVOLUSIONER ANTI-IMPERIALIS

Kesimpulan Simatupang ini merupakan persoalan penting, terutama bagi Angkatan Laut kita karena djustru menjangkut kedudukan negeri kita sebagai „negeri maritim“. Apakah karena Indonesia adalah negeri maritim, maka ia harus bersahabat dengan SEATO? Apakah karena Indonesia adalah negeri maritim, maka ALRI kita jang anti-imperialis harus mengadakan latihan² perang dengan angkatan laut negara² SEATO jang im-

perialis ?

Mari kita setjara singkat membahas soal kedudukan negeri kita sebagai negeri maritim. Apa sebenarnja jang dimaksudkan dengan sebutan itu ? Bagaimana menginterpretasikan pandangan jang demikian dalam rangka doktrin pertahanan nasional jang harus tunduk kepada strategi umum Revolusi Indonesia ? Bagaimana seharusnja konsepsi maritim jang revolusioner ?

Memang benar, Indonesia adalah negeri maritim dan harus mendjadi negeri maritim jang kuat. Tradisi ini sudah tertanam sedjak ber-abad² jang lalu dengan kepahlawanan Rakjat Indonesia dilautan luas, djauh sebelum kedatangan kaum kolonialis Belanda. Pelaut² kita dapat membanggakan tradisi nenek-mojang kita jang mentjapai prestasi jang tinggi dalam memelihara hubungan² laut dengan mengarungi samudera². Dapat kita ketahui pula bahwa zaman² kedjajaan dalam sedjarah negeri kita djustru terdjadi pada waktu keradjaan Sriwidjaja dan keradjaan Madjapahit jang kedua-duanja mempunjai kekuatan dilaut dan dapat memelihara hubungan antar pulau jang baik. Tapi perlu diperhatikan pula bahwa keruntuhan keradjaan Sriwidjaja jang achirnja merosot mendjadi daerah teror badjaklaut disebabkan karena kekuatan dilaut tidak disertai perkembangan hubungan² didaratan.

Sebaliknya, kaum imperialis Belanda dulu dapat menundukkan negeri kita karena mereka berhasil mematahkan kekuatan kita dilaut dan mendesak keradjaan Mataram jang tidak mempunjai kekuatan dilaut.

KONSEPSI MARITIM IMPERIALIS TIDAK TJOTJOK BUAT INDONESIA

Letak dan susunan geografis negeri kita mengharuskan kita untuk mendjadikan Republik kita sebagai negara maritim. Tetapi dalam mengartikan sebutan ini, tidak benar djika kita mentjari dasarnja dalam konsepsi² maritim dari negara² imperialis seperti Inggris, Amerika dan Djepang.

Konsepsi maritim biasanja didasarkan pada teori² *Alfred Thayer Mahan* (1840-1914), seorang Admiral Amerika jang umumnja dianggap sebagai bapaknja konsepsi² maritim modern Inggris dan Amerika. Mahan berusaha membuktikan bahwa kedjajaan dilaut mempunjai pengaruh jang bersifat menentukan bagi perkembangan sedjarah dan ide²nja itu mengilhami pembangunan angkatan² laut AS dan Inggris dizaman imperialisme. Konsepsi jang demikian jang memang seluruhnja diabdikan kepada kepentingan² ekspansi imperialis seperti jang terbukti dari perkembangan² sedjarah sedjak permulaan abad ke-20 ini, sudah tentu tidak sesuai samasekali dengan kepentingan² kita, dimana konsepsi negara maritim mendjadi bagian integral daripada doktrin pertahanan nasional jang revolusioner dan anti-imperialis. Untuk Indonesia, kita wadjib menjusun konsepsi negara maritim jang sesuai dengan kepentingan² revolusi kita jang anti-imperialis, jang ditudjukan kepada menggunakan kekuasaan dilautan kita jang sangat luas untuk menjelamatkan Republik kita dari agresi² dari luar serta menghantjurkan kegiatan² kontra-

revolusi dan subversif dari dalam.

Pertama, konsepsi maritim negara kita harus ditudjukan untuk mempertahankan Negara Kesatuan kita, sesuai dengan kerangka pertama dari tiga kerangka Manipol. Bukankah mendjadi pengalaman kita yang pahit bahwa usaha untuk merongrong Negara Kesatuan kita selalu merupakan tudjuan pokok dari kaum kontra-revolusi, jaitu dengan gerakan² separatis, dengan usaha² untuk menguasai pulau² tertentu, dengan memutuskan hubungan² antara Rakjat disatu pulau dengan Rakjat dipulau lain dan dengan mempertentangkan „pusat” dengan „daerah²”? Mendjaga keutuhan wilajah merupakan tugas vital dalam menghadapi kaum separatis, seperti telah dibuktikan oleh pengalaman² kita sewaktu pemberontakan PRRI-Permesta. Untuk itu pula, ALRI harus djuga menguasai kemahiran mendaratkan pasukan² diwilajah musuh dan mendjamin logistik yang terus-menerus.

Tidak kalah penting pula usaha² ALRI untuk mendjaga keselamatan armada niaga kita yang mempunjai tugas penting dalam memperbaiki keadaan ekonomi dan melantjarkan roda² perekonomian kita. Demikian pula, lautan² kita harus terus-menerus didjaga agar bersih dari penjelundupan yang sangat merugikan itu. Tugas² ini semua perlu diberi tempat dalam konsepsi maritim kita.

Kedua, konsepsi maritim negara kita harus bertudjuan memperkuat politik luarnegeri yang anti-imperialis, jaitu untuk mendjaga perbatasan² kita yang sedemikian pandjang itu terhadap serangan fihak imperialis dan dengan tegas menghadapi

blok imperialis SEATO dll. jang mengelilingi negeri kita serta memperkuat hubungan² dengan negara² the new emerging forces. Perkembangan² pada waktu achir² ini membuktikan bahwa kaum imperialis jang dikepalai oleh imperialis AS sedang memperhebat usaha²nja untuk membangun serangkaian pangkalan² disekitar kepulauan Indonesia. Maksud AS mendirikan pangkalan² Angkatan Laut di Australia Barat Daja dan membantu India mendirikan pangkalan² dikepulauan Andaman dan Nikobar harus diperhatikan benar² sebagai antjaman baru terhadap kemerdekaan nasional kita sebagai usaha untuk „mengepung” gerakan kemerdekaan nasional di Asia Tenggara.

Politik luarnegeri Republik Indonesia jang anti-imperialis mendapat perwujudannja dalam gagasan the new emerging forces jang telah dikembangkan, terutama sedjak pidato jang diutjapkan oleh Bung Karno didalam Konferensi Negara² Non-Aligned dalam tahun 1961. Konfrontasi antara the new emerging forces (NEF) jang terdiri dari negara² sosialis, negara² baru merdeka jang anti-imperialis dan kekuatan² progresif lainnja diseluruh dunia, dengan the old established forces (OEF) jang terdiri dari negara² imperialis, negara² kolonialis, agen² mereka dimanapun djuga serta kekuatan² reaksioner lainnja diseluruh dunia sungguh merupakan suatu tantangan jang tegas terhadap pandangan geo-politik. Geo-politik bertudjuan mengabdikan kepada politik ekspansi disatu fihak dan untuk mengabdikan kepada politik kapitulasi (menjerah) difihak lain. Politik konfrontasi

antara the new emerging forces dan the old established forces bertudjuan menghimpun semua kekuatan² anti-imperialis untuk menggagalkan agresi dan intervensi imperialis, untuk menjokong perjuang-an kemerdekaan, untuk membela kemerdekaan nasional, untuk memperkuat negeri² sosialis dan untuk mentjapai perdamaian dunia.

PERTAHANAN RAKJAT, BUKAN "TERRITORIAL WAR"

Setelah memberikan uraian jang menjeluruh tentang beberapa hal jang berhubungan dengan teori pertahanan nasional, saja ingin dalam bagian terachir ini, menjoroti prinsip² pokok pertahanan nasional kita seperti telah ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. II/1960 serta lampiran²nja. Ketetapan MPRS, fasal 4, ayat 4 dan 5 berbunji sbb. :

„Politik keamanan/pertahanan Republik Indonesia berlandasan Manifesto Politik Republik Indonesia beserta peperintjiannja dan berpangkal kepada kekuatan Rakjat dengan bertudjuan mendjamin keamanan/pertahanan nasional serta turut mengusahakan terselenggaranja perdamaian dunia”.

„Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif dan bersikap anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dan berdasarkan pertahanan Rakjat semesta jang berintikan tentara sukarela dan milisi”.

Bab III, ayat (41) dari Lampiran A daripada

Ketetapan MPRS tersebut jang mempunyai kekuatan sebagai *penjempurnaan* terhadap Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berrentjana karja Depernas berbunji sbb. :

„Sebagai konsekwensi daripada bentuk dan sifat Keamanan/Pertahanan RI itu, maka Angkatan Perang Republik Indonesia turut serta menyelesaikan tuntutan² revolusi Nasional, dalam bidangnja masing²”.

Selain menetapkan hubungan jang tegas antara sifat dan sikap pertahanan nasional kita dengan dasar² Revolusi serta pokok² politik luar negeri kita jang telah didjelaskan setjara lebih terperinci diatas, ketentuan² MPRS ini memberi tekanan jang kuat kepada keharusan supaya politik keamanan/pertahanan negeri kita berpangkal kepada kekuatan Rakjat serta berdasarkan pertahanan Rakjat semesta. Tekanan² itu sepenuhnya sesuai dengan tradisi perdjuaan bersendjata negara serta Rakjat kita selama tahun² 1945 sampai 1948.

Prinsip² ini berarti bahwa Angkatan Bersendjata kita dibangun untuk dapat pada setiap waktu menjelenggarakan perang ber-sama² dengan Rakjat, jaitu pada hakekatnja, menjelenggarakan perang Rakjat. Ada teoritikus² militer jang menganggap bahwa „perang rakjat berpokok kepada kelemahan dari suatu negara” (lihat bukunja Djenderal Major Simatupang, hal. 173) jaitu mentjerminkan keterbelakangan suatu masjarakat agraris jang tidak mempunyai angkatan² bersendjata modern. Pandangan ini didasarkan pada tulisan² Karl von Clausewitz (1780-1831), seorang djenderal Pru-

sia, jang mentjerminkan kepanikan kaum junker Prusia terhadap pemberontakan² kaum tani melawan feodalisme dizaman revolusi burdjuis. Menurut pandangan jang diadjudkan oleh Simatupang itu, djika Angkatan Bersendjata telah dapat dibangun setjara modern dilapangan ilmu pengetahuan, teknik dan perindustrian, maka perang Rakjat mendjadi hal jang tidak diperlukan lagi. Bahkan dia sependirian dengan *Liddell Hart*, penulis militer Inggris jang sangat menjesali perkembangan-perkembangan perang gerilja di-negeri² Eropa Timur karena telah mendjadi dasar kokoh bagi berdirinja negara² Sosialis disana, jang berpendapat bahwa perang Rakjat harus dielakkan karena „meninggalkan akibat² jang berat” (Simatupang, hal. 176).

Pandangan ini, jaitu jang mempertentangkan dasar² kerakjatan daripada sistim pertahanan nasional kita dengan usaha² untuk membangun Angkatan Bersendjata jang modern, tidak dibenarkan oleh Ketetapan MPRS jang baru saja kutip. Pandangan keliru ini didasarkan pada teori pertahanan jang diperkembangkan di Jugoslavia, terutama oleh seorang djenderal Jugoslavia, *Kveder* didalam tulisannja jang berdjulud "Territorial War" dan jang dimuat didalam madjalah *Jugoslavia Foreign Affairs*, bulan Oktober, 1953. Didalam tulisan itu, diusahakan untuk menggantikan tradisi² perlawanan Rakjat Jugoslavia (gerilja atau partisan), dimana Rakjat mengangkat sendjata untuk bertempur melawan musuh, dengan suatu sistim pertahanan jang berdasarkan kekuatan

bersendjata modern dimana kekuatan-kekuatan Rakjat hanja diberi peranan sekunder dalam keadaan dimana angkatan darat terpaksa mundur dan mendjalankan perlawanan diwilajah luas setjara ter-pentjar². Dalam sistim demikian, selandjutnja, prinsip bahwa semua Angkatan Bersendjata memegang peranan jang sama penting djuga dilanggar karena Angkatan Laut dan Angkatan Udara hanja dapat memegang peranan jang bersifat membantu.

Pembangunan Angkatan Bersendjata RI dengan peralatan jang serba modern seperti telah terdjadi selama beberapa tahun ini sangat dibanggakan oleh seluruh Rakjat Indonesia sebab dengan demikian kemungkinan menjelamatkan dan memenangkan revolusi kita sesuai dengan kehendak Rakjat mendjadi lebih pasti lagi. Dengan Angkatan Bersendjata jang modern dan dengan sistim pertahanan nasional jang „berpangkal kepada kekuatan Rakjat... dan berdasarkan pertahanan Rakjat“, seperti ditjantumkan dalam Ketetapan MPRS, tidak ada kekuatan didunia jang akan bisa melawan arus Revolusi Indonesia dan menghantjurkan Republik kita.

DJANGAN TJAMPURI BIDANG JANG BUKAN BIDANGNJA

Lampiran A daripada Ketetapan MPRS jang telah saja kutip diatas djuga menetapkan suatu prinsip jang amat penting, jaitu tentang kedudukan Angkatan Bersendjata didalam masjarakat di-

mana dikatakan bahwa „Angkatan Perang RI turut serta menyelesaikan tuntutan² revolusi Nasional dalam bidangnya masing²”. Kalau kita mau berbitjara tentang kedudukan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian Negara sebagai karjawan, maka sudah djelas setiap Angkatan itu sudah semestinja diberikan tempat diberbagai lembaga negara, sampai kepada lembaga² tertinggi, dibidang legislatif maupun eksekutif. Di-lembaga² itu, mereka mewakili bidang mereka masing² karena bidang² itu memainkan peranan jang vital bagi penyelesaian Revolusi kita dan sudah barang tentu ini akan memperkuat hubungan² diantara bidang² itu. Prinsip supaja masing² turut serta dalam pekerdjaan jang luhur ini setjara „gotong-rojong” harus menjadi tjiri daripada usaha seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ini, perlu dihindari usaha-usaha untuk mentjampuri bidang² lain jang bukan bidangnya Angkatan Bersendjata, karena ini dapat menimbulkan pertentangan² jang merugikan bagi kepentingan² nasional kita semua, maupun bagi nama baik tiap² Angkatan Bersendjata kita. Usaha² jang demikian dapat merusak dwitunggal antara Angkatan Bersendjata dan Rakjat.

III. KESIMPULAN²

Sebagai achir kata, ada baiknja kiranja kalau saja setjara singkat berusaha menjimpulkan pokok² jang telah saja kemukakan dalam tjeramah ini.

Pertama, Angkatan Laut RI, seperti halnja setiap Angkatan Bersendjata, harus mengabdikan diri kepada Revolusi Indonesia, sesuai dengan tradisi² kepahlawanan pelaut² kita, baik dizaman pendjadjahan Belanda dengan pemberontakan di atas kapal „Zeven Provincien” maupun dizaman perdjjuangan membela Republik kita, sampai kepada perdjjuangan untuk membebaskan Irian Barat. Untuk tugas ini, maka politik revolusioner harus difahami setjara mendalam, karena ALRI ber-sama² dengan angkatan² lainnja harus dipimpin oleh politik revolusioner itu, dipimpin oleh Manipol.

Kedua, ALRI, seperti halnja semua Angkatan Bersendjata RI, adalah alat pembela dan penjelaat Revolusi, dan harus membela Rakjat, bersatu dengan Rakjat, dan sendirian dengan Rakjat, tak lain karena ALRI kita memang merupakan bagian integral daripada Rakjat, dan terdiri dari Rakjat.

Ketiga, negeri kita berwilajah luas, terdiri dari be-ribu² pulau, besar dan ketjil, dengan pantai jang amat pandjang, dengan lautan² luas, dan berpenduduk 100 djuta orang. Negeri kita ini

masih belum merdeka penuh, jaitu masih terdapat pengaruh² imperialisme dan kolonialisme, dan djuga masih semi-feodal, dan oleh karena itu ALRI kita harus memupuk terus tjiri kepribadian-nja jang anti-fasis, demokratis, anti-imperialis dan ber-tjita² Sosialisme. Hanja dengan demikian akan terdapat dasar jang kokoh untuk turut serta menjelesaikan Revolusi Indonesia jang anti-imperialis dan anti-feodal dan berharidepan Sosialisme.

Keempat, politik pertahanan nasional kita harus sesuai sepenuhnya dengan revolusi kita. Faktor² seperti letak serta susunan geografis harus dipergunakan se-efektif²nja untuk tudjuan² revolusi kita. Pandangan geo-politik jang bertudjuan membenarkan politik ekspansi disatu fihak dan politik-menjerahisme difihak negeri² jang mendjadi objek kaum expansionis-imperialis, dengan sendirinja tidak bisa diberi tempat dalam politik pertahanan nasional kita jang harus diatas segala-galanja bersifat revolusioner dan dipimpin oleh politik revolusioner (Manipol).

Kelima, kepentingan² revolusi serta letak dan susunan negeri kita jang bersifat kepulauan berarti, bahwa politik pertahanan kita harus memberi tempat jang sama kepada setiap Angkatan Bersendjata dengan tidak menitikberatkan kepada salahsatu Angkatan. Pertahanan nasional hanja bisa kuat dengan tertjapainja kordinasi efektif antara keempat angkatan.

Keenam, ALRI kita jang bertradisi anti-imperialisme harus memegang peranan vital dalam memperkuat politik luarnegeri RI jang anti-impe-

riallis, jang membela the new emerging forces dan melawan the old established forces. Tugas ini sangat perlu didjundjung tinggi oleh ALRI kita dimana negeri kita dikelilingi djustru oleh negara² the old established forces dengan angkatan² laut mereka jang selalu siap untuk mengepung negeri kita jang berpolitik anti-imperialis itu.

Demikian masalah² jang ingin saja kemukakan dalam tjeramah ini. Mudah²an, tjeramah ini akan bermanfaat, terutama dalam mempererat hubungan antara kita, dan dengan demikian ikut pula merealisasi wedjangan Bung Karno mengenai memberantas Komunisto-phobi dan djuga merealisasi serta mendjundjung tinggi sembojan Dwi-tunggal Angkatan Bersendjata dan Rakjat.

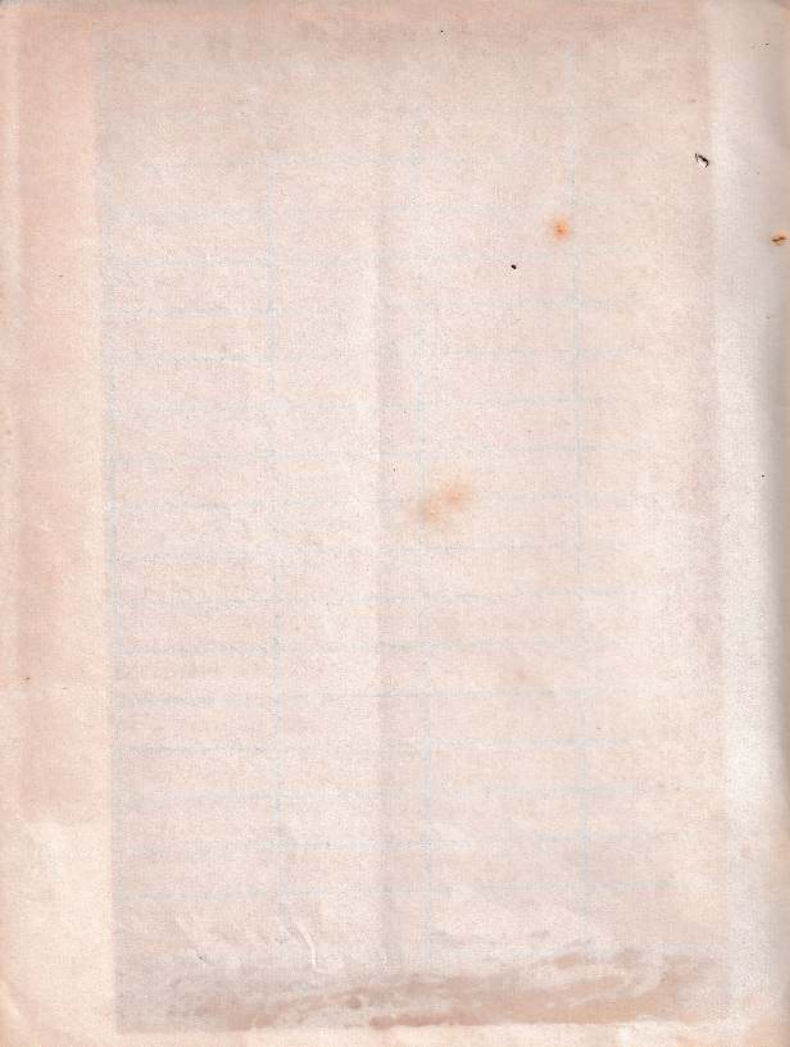


ISI

hal.

Sekedar pengantar	3
PKI dan ALRI (SESKOAL)	5
I Beberapa soal tentang politik	9
Pemilikan atas alat ² produksi menentukan hubungan ² antar-manusia	11
Orang revolusioner adalah orang jang aktif memihak perjuangangan Rakjat	13
Strategi umum revolusi Indonesia ditentukan dalam Manipol	16
Revolusi Indonesia revolusi semua klas dan golongan anti-imperialis	19
Bagian terbesar Angkatan Bersendjata anak ² buruh dan tani	21
Pantjasila alat pemersatu !	22
Nasakom poros persatuan nasional	24
Dua tahap Revolusi Indonesia	26
Persamaan dan perbedaan masjarakat Sosialis dan masjarakat Komunis	28
Pemilikan perseorangan atas alat ² produksi sumber penghisapan	30
Untuk mengerti Sosialisme, peladjari Marx- isme !	33
Kekuasaan negara harus sepenuhnya ditangan kaum revolusioner	34
Rituling mutlak perlu untuk revolusi-komplit	36

II	Beberapa soal tentang pertahanan	38
	Dwitunggal Angkatan Bersendjata dan Rak- jat untuk revolusi	38
	Jang primer politik, bukan geografi	41
	Pandangan geo-politik bertentangan dengan pandangan revolusioner	44
	Pandangan geo-politik mengebiri politik luar- negeri kita jang anti-imperialis	46
	Konsepsi maritim kita harus tegas revolusi- oner anti-imperialis	48
	Konsepsi maritim imperialis tidak tjotjok buat Indonesia	50
	Pertahanan Rakjat, bukan „territorial war”	53
	Djangan tjampuri bidang jang bukan bidang- nja	56
III	Kesimpulan ²	58



6808-b

TANGGAL KEMBALI

Untuk lebih mendalami soal² yang diadjukan di-
dalam tjeramah ini, buku² D.N. Aidit berikut ini akan
sangat membantu :

- * Pilihan Tulisan djilid I (habis)
- * Pilihan Tulisan djilid II (habis)
- * Pilihan Tulisan djilid III (akan terbit)
- * Pengantar Etika dan Moral Komunis Rp. 50.-
- * Dekon dalam udjian " 120.-
- * Tentang Marxisme Rp. 150.-
- * Berani, berani, sekali lagi berani " 125.-
- * Hajo, ringkus dan ganjang kontra-
revolusi ! " 40.-
- * PKI dan AURI " 25.-
- * PKI dan Polisi " 30.-
- * PKI dan Angkatan Darat (sudah terbit)

Pesan pada Jajanan „Pembaruan“, kotakpos 2522

Djakarta



